

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di BPPKAD Kabupaten Ponorogo

Ilda Putri Insirohmawati

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: ildaputri584@gmail.com

E-mail Koresponden: ildaputri584@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to determine how the influence of the application of government accounting systems, internal control systems and human resource competencies on the quality of financial reports at BPPKAD Ponorogo Regency. The sampling method in this study used total sampling. The analytical method used is multiple linear regression analysis with the help of SPSS 25 and also uses descriptive statistical tests, classical assumption tests, data quality tests and hypothesis testing. The results of the test of the coefficient of determination show the R² value of 0.406. The results of this test indicate that the independent variables of the application of government accounting systems, internal control systems, and human resource competencies are able to influence the dependent variable on the quality of financial reports.

Keywords: *Government Accounting Systems, Internal Control Systems, Human Resources Competence, Quality Of Financial Reports.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *total sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 25 dan juga menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian pada pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai R² sebesar 0,406. Hasil uji ini menunjukkan bahwa variabel independent penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia mampu mempengaruhi variabel dependent kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan.

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua jenis pemerintahan tersebut memerlukan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggungjawab. Pengelolaan tata pemerintahan keuangan yang baik memerlukan kewenangan secara jelas dan konsisten. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bertanggungjawab, pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Roviyantie (2011) laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan harus menyajikan informasi keuangan yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat: (1) relevan yaitu apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna ataupun manajerial, (2) andal yaitu informasi harus disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, (3) dapat dipahami, apabila informasi yang disajikan mudah untuk dipahami pengguna laporan keuangan, (4) dapat dibandingkan, apabila dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya.

Menurut (Fatimah, 2019) www.ponorogo.id Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik keuangan yang baik. Dapat diraih salah satunya terkait sistem akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern yang sudah diterapkan dengan baik. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 10 menyatakan bahwa laporan keuangan disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pertanggung jawaban yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (BPPKAD) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan (Cahyono, 2020) www.bppkad.go.id. Maka dalam hal ini penelitian tertarik mengambil faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Sehingga yang mempengaruhi hal tersebut penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No.59 Tahun 2007). Pengelolaan keuangan dari daerah secara baik wajib dijalankan dengan mempresentasikan pada tujuan pemerintah dengan bersih. Mengelola keuangan pada daerah

secara baik dilihat dari kapasitas Ketika melakukan control aturan keuangan daerah dengan ekonomis, kemudian efisien, kemudian efektif, transparan serta akuntabel (Yusniar dkk, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern bisa tercapai dengan melaksanakan lima elemen pengendalian intern. Pertama, lingkungan pengendalian yang merupakan kondisi didalam instansi pemerintah yang memberikan pengaruh efektivitas dalam mengendalikan secara intern. Kedua, penilaian pada resiko yaitu aktivitas pengendalian terhadap kemungkinan adanya ancaman dalam mencapai suatu tujuan serta target instansi pada pemerintah. Ketiga, aktivitas pengendalian yang merupakan suatu perbuatan yang dibutuhkan agar bisa memberikan pengatasan pada resiko serta menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan pegangan agar bisa memberikan kepastian jika perbuatan mengatasi resiko sudah dijalankan dengan efektif. Kemudian keempat, beberapa informasi serta komunikasi, informasi yakni suatu data yang sudah dilakukan pengelolaan yang bisa dipakai agar bisa mengambil keputusan yang bertujuan bisa menyelenggarakan suatu tugas serta fungsi pada instansi pemerintah. Komunikasi yakni tahap dalam menyampaikan pesan ataupun informasi dengan memakai symbol ataupun lambang secara tertentu baik dengan langsung ataupun tidak langsung agar bisa memperoleh umpan balik. Kelima, memantau yakni tahapan dalam menilai terhadap mutu kerja pada sistem dalam mengendalikan intern serta tahapan dalam membagikan keyakinan jika temuan audit serta evaluasi lain agar dilanjutkan.

Wibowo (2016) kompetensi yakni suatu kepasitas untuk mengerjakan ataupun menjalankan suatu pekerjaan secara efektif. Setiap entitas pemerintahan membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten agar bisa memberikan hasil laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dikarenakan dalam menciptakan laporan keuangan secara berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang mampu menerapkan suatu sistem pengendalian secara internal dari pemerintah (Nurhasanah dkk, 2018)

B. KAJIAN LITERATUR

Laporan Keuangan

Menurut pandangan Munawir (2014) laporan keuangan yakni sebuah alat yang terutama agar bisa mendapatkan suatu informasi yang berkaitan pada posisi keuangan serta beberapa hasil yang sudah dilakukan pencapaian dari sebuah perusahaan yang berhubungan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantuu bagi para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi. Laporan Keuangan yakni media untuk sebuah entitas pemerintah agar bisa memiliki tanggungjawab pada kinerja keuangan terhadap publik (Rahayu ,2014)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Menurut Bastian (2010:9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah merupakan sebuah alat yang sangat penting dalam menyediakan sebuah catatan informasi mengenai posisi keuangan yang relevan dan digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah instansi selama periode tertentu.

Sistem Akuntansi Pemerintah

Menurut Mahmud (2011) sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan rangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan dan penyusunan data hingga pelaporan status keuangan dan operasional keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah alat yang digunakan untuk mengimplementasikan prinsip akuntansi yang ditentukan dalam SAP kebijakan akuntansi. Kemudian SAPD yakni alat yang digunakan untuk mengimplementasikan prinsip akuntansi. Kemudian SAPD mendemonstrasikan serangkaian tahapan akuntansi, termasuk proses mengidentifikasi transaksi keuangan, menyimpulkan di jurnal, memposting ke buku besar, mengedit neraca, menyiapkan dokumen kerja konsolidasi dan akhir menyiapkan laporan keuangan. Menurut Nurul (2018) Sistem Akuntansi Pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). SAPP adalah serangkaian prosedur manual ataupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Apabila di SAPP mengurus operasi keuangan Pemerintah Pusat, maka SAPD mengurus operasi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern

Mutia (2020) sistem pengendalian intern yakni tahapan secara integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus serta aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemimpin dan seluruh karyawan agar bisa membagikan suatu keyakinan yang memadai terhadap terwujudnya sebuah tujuan dari organisasi dengan aktivitas yang efisien serta efektif, sebuah kehandalan laporan finansial, kemudian suatu sekuritas asset dari sebuah negara, selain taat atau tidaknya pada aturan yang berlaku. Pengawasan secara internal yakni semua tahapan aktivitas dalam audit, kemudian revidu, evaluasi, memantau serta aktivitas suatu pengawasan yang lain pada pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi yang bertujuan agar bisa membagikan keyakinan yang memadai jika aktivitas sudah dijalankan selaras pada tolak ukur yang sudah ditentukan dengan efisien serta efektif agar suatu kepentingan pimpinan Ketika mencapai tat pemerintahan yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berperan untuk mengendalikan segala kegiatan yang ada dalam instansi atau organisasi, sehingga jika terjadi suatu bentuk penyimpangan atau tidak sesuai dengan seharusnya dilakukan, maka tugas dari pengendalian internal adalah mengingatkan supaya tidak terjadi kesalahan yang sama.

Sumber Daya Manusia

Pandangan Saputra (2015) bahwa kompetensi sumber daya manusia meliputi kemampuan yakni kapasitas individu, suatu organisasi kelembagaan, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcome*). Dalam organisasi publik, peran sumber daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Maka dari itu, untuk pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan.

Menurut Hana (2020) keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan sumber daya manusia yang berada ada didalamnya. Dalam organisasi publik, peran sumber daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Maka dari itu, untuk pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam

pekerjaannya. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terwujudnya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

C. PELAKSAAAN DAN METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada bidang pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang anggaran, dan bidang akuntansi.

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan Total Sampling. Menurut Sugiyono (2018) total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah para pegawai yang terlibat dalam bidang penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 50 pegawai.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3).

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono (2018) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif karena data yang dibutuhkan berupa angka-angka dan metode analisis datanya menggunakan analisis regresi linier berganda sedangkan alat pengukur yang digunakan adalah SPSS melalui kuesioner yang telah dikumpulkan. Maka dari itu sebelum melakukan analisis data maka diperlukan uji atas pertanyaan melalui uji kualitas data. Setelah semua pertanyaan dinyatakan valid dan reliabel maka dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018) analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independent dan mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel dependent (terikat) terhadap variabel independent (bebas). Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Laporan Keuangan
- A : Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi Variabel Bebas
- X1 : Sistem Akuntansi Pemerintah
- X2 : Sistem Pengendalian Intern
- X3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- ε : Error

Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk meniali hipotesis dalam penelitian ini adalah uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Uji-t dilakuka untuk melihat apakah ada pengaruh parsial secara statistik antara variabel independent dan dependen. Uji-F dilakukan untuk melihat apakah hubungan antara variabel independent dan dependen secara statistik serempak signifikan. Koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan seberapa baik satu variabel dapat menjelaskan variabilitas variabel lain dengan melihat seberapa baik variabel itu menggambarkan variabel independent.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan software SPSS versi 25 didapatkan ringkasan hasil analisis regresi linier berganda antara variabel Sistem Akuntansi Pemerintah (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,512	3,745		2,006	,051
Sistem akuntansi pemerintah	,229	,089	,328	2,562	,014
Sistem pengendalian intern	,314	,127	,313	2,464	,018
Kompetensi sumber daya manusia	,220	,097	,260	2,263	,028

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Hasil dari uji analisis regresi diatas menunjukkan persamaan diperoleh dari hasil analisis yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 7,512 + 0,229X_1 + 0,314X_2 + 0,220X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas menggambarkan bahwa:

- Konstanta dalam penelitian diatas sebesar 7,152. Hal tersebut menunjukkan variabel sistem akuntansi pemerintah (X1) sistem pengendalian intern (X2) dan kompetensi sumber daya manusia (X3) bernilai 0, maka kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 7,512.
- Koefisien regresi variabel sistem akuntansi pemerintah (X1) sebesar 0,229 artinya jika variabel independent lain nilainya tetap sedangkan variabel sistem akuntansi pemerintah (X1) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,229 satuan atau 22,9% dengan asumsi bahwa variabel dependen dan independen lainnya bernilai konstan atau tetap.
- Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern (X2) sebesar 0,314 artinya jika variabel sistem pengendalian intern (X2) mengalami kenaikan sebesar 0,314 satuan atau 31,4% dengan asumsi bahwa variabel dependen dan independen lainnya bernilai konstan atau tetap.
- Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia (X3) sebesar 0,220 artinya jika variabel kompetensi sumber daya manusia (X3) mengalami kenaikan 1 satuan maka kualitas laporan keuangan (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,220 satuan atau 22,0% dengan asumsi bahwa variabel dependen dan independen lainnya bernilai konstanta atau tetap.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan software SPSS versi 25 didapatkan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

- Uji t (Uji Parsial)

Proses pengujiannya adalah dengan menentukan nilai t_{tabel} dalam penelitian ini pada $\alpha=5\%$ atau 0,05 dan nilai α dibagi dua yaitu 0,025 karena menggunakan hipotesis dua ara, dan $N=50$ jumlah data dan $K=4$ seluruh variabel sehingga diperoleh df adalah $(N-k) = 50 - 4 = 46$. Sehingga ditemukan nilai t tabel sebesar 2,01290 atau 2,012. Hasil uji hipotesis uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,512	3,745		2,006	,051
Sistem akuntansi pemerintah	,229	,089	,328	2,562	,014
Sistem pengendalian intern	,314	,127	,313	2,464	,018
Kompetensi sumber daya manusia	,220	,097	,260	2,263	,028

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Tabel diatas dapat dilihat bahwa (1) variabel sistem akuntansi pemerintah memiliki nilai sig 0,014 yang menunjukkan bahwa lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung > t tabel yaitu (2,562 > 2,012). Maka dari hasil uji hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima yang berarti tingkat pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di BPPKAD Kabupaten Ponorogo, (2) variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai sig 0,014 yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung > t tabel yaitu (2,464 > 2,012). Maka dari hasil uji hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima yang berarti tingkat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di BPPKAD Kabupaten Ponorogo, (3) variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai sig 0,028 yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung > t tabel yaitu (2,263 > 2,012). Maka dari hasil uji hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima yang berarti tingkat pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

b. Uji F (Uji Serempak)

Uji F bertujuan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independent secara serempak (Bersama-sama) terhadap variabel dependen yang dilakukan dengan langkah membandingkan nilai dari F hitung dengan F tabel. Proses pengujian ini menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05), sedangkan untuk menentukan nilai F tabel menggunakan ketentuan $df_1 = k-1$; $4 - 1 = 3$ dan $df_2 = n - k$; $50 - 4 = 46$.

Tabel 3. Hasil uji serempak (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	130,487	3	43,496	10,468	,000 ^b
	Residual	191,133	46	4,155		
	Total	321,620	49			

a. Dependent variable: kualitas laporan keuangan

b. Predictors: (constant), kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi pemerintah

Berdasarkan hasil uji F yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa F hitung adalah sebesar 10,468 dengan nilai sig sebesar 0,000. Sehingga nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu (10,468 > 2,81) dengan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak dan H_4 diterima artinya variabel independent yaitu sistem akuntansi pemerintah (X1), sistem pengendalian intern (X2) dan kompetensi sumber daya manusia (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika $R^2 = 0$ berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependensangat terbatas. Jika $R^2 = 1$ berarti semakin besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, sehingga sudah tepat dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,637 ^a	,406	,367	2,038

- Predictors: (constant), kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi pemerintah
- Dependent variable: kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa nilai R Square (R^2) yang diperoleh sebesar 0,406 artinya bahwa sistem akuntansi pemerintah (X1), sistem pengendalian intern (X2), dan kompetensi sumber daya manusia (X3) dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Y) di BPPKAD Ponorogo sebesar 0,406 atau 40,6%. Maka sisanya 59,4% (100%-40,6%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diolah dapat ditarik kesimpulan seperti berikut: (1) penerapan sistem akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi pemerintah maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan. (2) penerapan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan. (3) kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan. Disamping itu, secara simultan antara pengaruh sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa dengan adanya indikator penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Disarankan bagi Pemerintah BPPKAD meningkatkan indikator variabel sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya diharapkan memilih objek penelitian lain dan mempeluas objek penelitiannya seperti pada tingkat provinsi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS-Imam Ghozali-2018. In Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hana Yusriani, H. (2020). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Kasus Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal) Universitas Pancasakti Tegal.
- Indonesia, P. R (2011) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Kementrian Keuangan Pemkab Ponorogo, (2021). <http://kominfo.jatimprov.go.id/berita>
- Mahmud. 2011 Psikologi Pendidikan. Bandung:Pustaka Setia.
- Nurhasanah, Firmansyah, & Sari, K. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Akuntanika*, 4(3), 121.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Keuangan Nomer 59 Tahun 2005. Tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- Rahayu, L., K., & Anisma, Y. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris pada SKPD Povinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riaum* 1(2), 1-15.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang no 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang no 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Roviyantie, D. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skripsi Universitas Siliwangi.
- Safridha, Mutia Aulia. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Saputra, A. 2015. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi pada SKPD Kabupaten Kampar)" *JOM Fekon* Vol.2 No.2 Oktober 1-5.
- Sugiyono. (2018) Prof.Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. 2016. Manajemen Kinerja (Edisi ke 3) Jakarta:Rajawali Pers.
- Yusniyar, darwanis & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (studi pada SKPA Pemerintah Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi* ISSN 2302-0164Pp. 100-115,5(2).